



BUPATI PEMALANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR 58 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI PEMALANG NOMOR 26
TAHUN 2016 TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH
KABUPATEN PEMALANG DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA ORGANISASI
PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
TAHUN 2016-2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEMALANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk dasar pengukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang, telah ditetapkan Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2016 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Pemalang dan Indikator Kinerja Utama Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang Tahun 2016 – 2021;
 - b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kabupaten Pemalang Tahun 2018, Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Pemalang dan Indikator Kinerja Perangkat Daerah di lingkungan Kabupaten Pemalang masih terdapat beberapa indikator belum spesifik dan terukur;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b maka Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2016 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Pemalang dan Indikator Kinerja Utama Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang Tahun 2016 – 2021 perlu disesuaikan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2016 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Pemalang dan Indikator Kinerja Utama Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang Tahun 2016 – 2021.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

11. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pembentukan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2006 Nomor 13);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2008 Nomor 1);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pemalang;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016 Nomor 12);
20. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang;
21. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang;
22. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Staf Ahli Bupati Pemalang;
23. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 48 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pemalang;
24. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Pemalang;

25. Peraturan Bupati Pematang Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pematang;
26. Peraturan Bupati Pematang Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pematang;
27. Peraturan Bupati Pematang Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pematang;
28. Peraturan Bupati Pematang Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Pematang;
29. Peraturan Bupati Pematang Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pematang;
30. Peraturan Bupati Pematang Nomor 54 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pematang;
31. Peraturan Bupati Pematang Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Pematang;
32. Peraturan Bupati Pematang Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pematang;
33. Peraturan Bupati Pematang Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pematang;
34. Peraturan Bupati Pematang Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pematang;
35. Peraturan Bupati Pematang Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pematang;
36. Peraturan Bupati Pematang Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pematang;
37. Peraturan Bupati Pematang Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pematang;

38. Peraturan Bupati Pematang Nomor 62 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Pematang;
39. Peraturan Bupati Pematang Nomor 63 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pematang;
40. Peraturan Bupati Pematang Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Pematang;
41. Peraturan Bupati Pematang Nomor 65 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Pematang;
42. Peraturan Bupati Pematang Nomor 66 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pematang;
43. Peraturan Bupati Pematang Nomor 67 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pematang;
44. Peraturan Bupati Pematang Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pematang;
45. Peraturan Bupati Pematang Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pematang;
46. Peraturan Bupati Pematang Nomor 70 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Pematang;
47. Peraturan Bupati Pematang Nomor 71 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pematang;
48. Peraturan Bupati Pematang Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Pematang;
49. Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2016 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Pematang dan Indikator Kinerja Utama Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pematang Tahun 2016 – 2021.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI PEMALANG NOMOR 26 TAHUN 2016 TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2016-2021.

Pasal 1

Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2016 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Pemalang dan Indikator Kinerja Utama Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang Tahun 2016 – 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 dan Lampiran 2 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

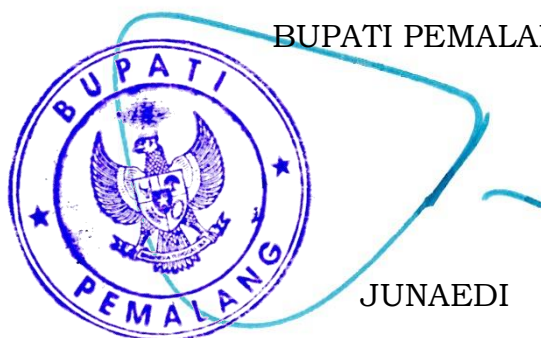
Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 10 Oktober 2018

BUPATI PEMALANG,



JUNAEDI

Diundangkan di Pemalang
pada tanggal 10 Oktober 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEMALANG



Drs. BUDHI RAHARDJO, MM
NIP. 19590601 198803 1 007

BERITA DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2018 NOMOR 58

LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI PEMALANG

NOMOR 58 TAHUN 2018

TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 26 TAHUN 2016 TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2016 – 2021

INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2016 – 2021

Misi 1: Meningkatkan akses masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan daerah berdasarkan azas musyawarah mufakat, dan gotong royong.

NO.	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	FORMULASI / RUMUS PERHITUNGAN	PENANGGUNGJAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah, serta pelaporan kinerja pemerintah daerah	Nilai SAKIP Pemda	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah dan pelaporan kinerja pemerintah daerah	Tingkat keselarasan antara program RKPD dengan RPJMD	%	$\frac{\text{Jumlah Program \& Kegiatan yang tercantum dalam RKPD}}{\text{Jumlah Program \& Kegiatan yang tercantum dalam RPJMD}} \times 100 \%$	Bappeda
				Nilai SAKIP Pemda	Skor	Nilai evaluasi AKIP yang diperoleh	Setda
				Persentase Prioritas Usulan Hasil Musrenbang yang diakomodir dalam RKPD	%	$\frac{\text{Jumlah usulan kegiatan prioritas yang terhimpun dalam Musrenbang}}{\text{Jumlah usulan kegiatan yang tercantum dalam RKPD}} \times 100 \%$	Bappeda

Misi 2: Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan, derajat kesehatan masyarakat, keluarga berencana, serta peningkatan keberdayaan perempuan, perlindungan sosial dan anak

NO.	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	FORMULASI / RUMUS PERHITUNGAN	PENANGGUNGJAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8
2.	Meningkatkan kualitas dan pelayanan pendidikan yang merata, terjangkau dan berkeadilan	1. Rata-rata lama sekolah 2. Harapan lama sekolah	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam menempuh pendidikan pada jenjang PAUD dan pendidikan dasar serta pendidikan non formal	Rata-rata lama sekolah	Tahun	Kombinasi antara partisipasi sekolah, jenjang pendidikan yang sedang dijalani, kelas yang diduduki dan pendidikan yang ditamatkan	Dindikbud
				Harapan lama sekolah	Tahun	$HLS_a^t = FK \times \sum_{i=a}^n \frac{E_i^t}{P_i^t}$	Dindikbud
				Angka Kelulusan SD/MI	%	$\frac{\text{Jumlah lulusan pada Jenjang SD/MI}}{\text{Jumlah Siswa Tingkat Tertinggi pada Jenjang SD/MI pada tahun sebelumnya}} \times 100\%$	Dindikbud
				Angka Kelulusan SMP/Mts	%	$\frac{\text{Jumlah lulusan pada Jenjang SMP/Mts}}{\text{Jumlah Siswa Tingkat Tertinggi pada Jenjang SMP/Mts pada tahun sebelumnya}} \times 100\%$	Dindikbud
				Angka Melanjutkan SD/MI	%	$\frac{\text{Jumlah siswa baru tingkat I pada jenjang SMP/MTs}}{\text{Jumlah lulusan pada jenjang SD atau MI Tahun ajaran sebelumnya}} \times 100\%$	Dindikbud
				Angka Melanjutkan SMP/MTs	%	$\frac{\text{Jumlah siswa baru tingkat I pada SMP/SMK/MA}}{\text{Jumlah lulusan pada jenjang SMP/MTs Tahun ajaran sebelumnya}} \times 100\%$	Dindikbud
			Meningkatnya kunjungan masyarakat ke perpustakaan	Angka kunjungan ke perpustakaan	%	$\frac{\text{Jumlah kunjungan ke perpustakaan dalam 1 tahun}}{\text{Jumlah penduduk usia 5 - 59 tahun pada tahun yang sama}} \times 100\%$	Dinpusarda
3.	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Usia Harapan Hidup	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Usia Harapan Hidup	Tahun	Angka perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur	Dinkes (Sumber data: BPS)
				Angka Kematian Ibu	Per 100.000 KH	$\frac{\text{Jumlah kematian ibu akibat dari proses kehamilan, persalinan, dan paska persalinan}}{\text{Jumlah kelahiran hidup dalam waktu yang sama}} \times 100.000$	Dinkes

NO.	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	FORMULASI / RUMUS PERHITUNGAN	PENANGGUNGJAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8
				Angka Kematian Bayi	Per 1.000 KH	$\frac{\text{Jumlah kematian bayi (berumur kurang dari usia 1 tahun)}}{\text{Jumlah kelahiran hidup dalam waktu yang sama}} \times 1.000$	Dinkes
				Angka Kematian Balita	Per 1.000 KH	$\frac{\text{Jumlah kematian anak (berumur kurang dari 5 tahun)}}{\text{Jumlah kelahiran hidup dalam waktu yang sama}} \times 1.000$	Dinkes
				Persentase Balita Gizi Buruk	%	$\frac{\text{Jumlah balita gizi buruk}}{\text{Jumlah balita di 1 wilayah pada kurun waktu yang sama}} \times 100\%$	Dinkes
			Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam ber-KB	Total Fertility Rate (TFR)	%	$TFR = 5 \sum_{i=15-19}^{45-49} ASFR_i$ <p>ASFR_i : ASFR untuk wanita pada kelompok usia ke-i i = kelompok usia 15-19, 20-24, ..., 45-49</p>	Dinsos KBPP
4.	Meningkatkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan daerah	Indeks Pembangunan Gender	Meningkatnya kualitas hidup perempuan dan partisipasi perempuan dalam ranah publik	Indeks Pembangunan Gender	Nilai	$IPJ = 1/3 (Xade(1) + Xade(2) + I inc-dis)$ <p>Ket : <i>Xade(1)</i> = <i>Xade</i> untuk harapan hidup <i>Xade(2)</i> = <i>Xade</i> untuk pendidikan <i>I inc-dis</i> = Indeks distribusi pendapatan</p>	Dinsos KBPP
				Indeks Pemberdayaan Gender	Nilai	$IDJ = 1/3 (I par + I dm + I inc-dis)$ <p>Ket : <i>I par</i> = Indeks Keterwakilan di Parlemen <i>I dm</i> = Indeks Pengambilan keputusan <i>I inc-dis</i> = Indeks distribusi Pendapatan</p>	Dinsos KBPP

NO.	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	FORMULASI / RUMUS PERHITUNGAN	PENANGGUNGJAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8
5.	Meningkatkan perlindungan sosial terhadap PMKS	Persentase PMKS yang tertangani	Meningkatnya penanganan pemberian jaminan sosial bagi PMKS	Persentase PMKS yang tertangani	%	$\frac{\text{Jumlah PMKS yang tertangani}}{\text{Jumlah PMKS yang ada}} \times 100\%$	Dinsos KBPP
			Meningkatnya cakupan kepemilikan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	Persentase kepemilikan KTP	%	$\frac{\text{Jumlah penduduk usia lebih dari 17 tahun yang ber - KTP}}{\text{Jumlah penduduk usia lebih dari 17 tahun atau yang telah menikah}} \times 100\%$	Disdukcatpil
				Persentase Anak Akta Kelahiran	%	$\frac{\text{Jumlah anak (0 - 18 tahun) yang memiliki akte kelahiran}}{\text{Jumlah penduduk usia 0 - 18 tahun}} \times 100\%$	Disdukcatpil

Misi 3: Mengembangkan ekonomi kerakyatan dan kedaulatan pangan berbasis sumberdaya lokal serta menanggulangi kemiskinan dan pengangguran

NO.	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	FORMULASI / RUMUS PERHITUNGAN	PENANGGUNGJAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8
6.	Meningkatkan tingkat kecukupan pangan masyarakat	Produktivitas padi	Meningkatnya produktivitas pertanian dalam arti luas	Produktivitas padi	kw/ha	$\frac{\text{Produksi padi (ton)}}{\text{Luas areal panen}} \times 10$	Dispertan
				Produktivitas jagung	kw/ha	$\frac{\text{Produksi jagung (ton)}}{\text{Luas areal panen}} \times 10$	Dispertan
				Produktivitas Kedelai	kw/ha	$\frac{\text{Produksi kedelai (ton)}}{\text{Luas areal panen}} \times 10$	Dispertan
				Produksi Komoditas peternakan utama	kg	Jumlah produksi komoditas peternakan utama yang ada	Dispertan
			Meningkatnya ketersediaan, distribusi dan konsumsi pangan	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	skor	$\% \text{ Angka Kecukupan Gizi (AKG)} \times \text{Bobot masing-masing kelompok pangan}$ Data Sensus Ekonomi Nasional (Susenas)	Dispertan (Sumber data: BPS)
				Ketersediaan cadangan pangan	ton	Akumulasi cadangan pangan dari awal periode RPJMD hingga tahun tertentu	Dispertan
7.	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi	Pertumbuhan Ekonomi	Meningkatkan pemerataan pendapatan masyarakat melalui peningkatan dan optimalisasi sektor usaha potensial di Kabupaten Pematang	Pertumbuhan Ekonomi	%	$\frac{\text{Produk Domestik Bruto pada tahun } n - \text{Produk Domestik Bruto pada tahun } (n-1)}{\text{Produk Domestik Bruto pada tahun } (n-1)} \times 100\%$	Bappeda (Sumber data: BPS)
				PDRB Per Kapita	Rp	$\frac{\text{PDRB}}{\text{Jumlah Penduduk pertengahan tahun}}$	Bappeda (Sumber data: BPS)

NO.	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	FORMULASI / RUMUS PERHITUNGAN	PENANGGUNGJAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8
		Laju Inflasi		Laju Inflasi	%	$[(1 + \Delta \text{Inf}_1)(1 + \Delta \text{Inf}_2)(1 + \Delta \text{Inf}_t)]^{1/t} - 1$ <p>Dimana :</p> <p>ΔInf = perubahan inflasi dari nilai tahun sebelumnya</p> <p>t = adalah periode pengamatan perubahan nilai inflasi.</p> <p>Sedangkan ΔInf dihitung dengan rumus sebagai berikut :</p> $\Delta \text{Inf} = \frac{\text{Inf}_{(n+1)} - \text{Inf}_{(n)}}{\text{Inf}_{(n)}} \times 100\%$ <p>Dimana :</p> <p>Inf_n = nilai inflasi pada tahun n</p> <p>$\text{Inf}_{(n+1)}$ = nilai pada 1 tahun berikutnya</p> <p>n = tahun ...</p>	Bappeda (Sumber data: BPS)
		Indeks Gini		Indeks Gini	Indeks	$G = 1 - \sum_{i=1}^k P_i(Q_i + Q_{i-1})$ <p>dimana:</p> <p>Pi : persentase rumahtangga atau penduduk pada kelas ke-i</p> <p>Qi : persentase kumulatif total pendapatan atau pengeluaran sampai kelas ke-i</p> <p>Nilai <i>gini ratio</i> berkisar antara 0 dan 1, jika:</p> <p>G < 0,3 = ketimpangan rendah</p> <p>0,3 ≤ G ≤ 0,5 = ketimpangan sedang</p> <p>G > 0,5 = ketimpangan tinggi</p>	Bappeda (Sumber data: BPS)
		Tingkat Pengeluaran Perkapita		Tingkat Pengeluaran Perkapita	Rp	Pengeluaran per kapita disesuaikan ditentukan dari nilai pengeluaran per kapita dan paritas daya beli. Rata-rata pengeluaran per kapita setahun diperoleh dari Susenas Modul, dihitung dari level provinsi hingga level kab/kota. Rata-rata pengeluaran per kapita dibuat konstan/riil dengan tahun dasar	Bappeda (Sumber data: BPS)
				Produksi perikanan tangkap	Kg	Jumlah produksi perikanan tangkap dalam satu tahun	Disperik
				Produksi perikanan budidaya	Kg	Jumlah produksi perikanan budidaya dalam satu tahun	Disperik

NO.	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	FORMULASI / RUMUS PERHITUNGAN	PENANGGUNGJAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8
			Meningkatnya kualitas serta produktivitas koperasi dan UMKM	Persentase koperasi sehat	%	$\frac{\text{Jumlah koperasi sehat}}{\text{Jumlah koperasi yang dinilai kesehatannya}} \times 100\%$	Diskoperindag
				Persentase pertumbuhan IKM	%	$\frac{\text{Jml IKM tahun } n - \text{jml IKM tahun } (n - 1)}{\text{Jml IKM tahun } (n - 1)} \times 100$	Diskoperindag
			Meningkatnya kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	Persentase pertumbuhan kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	%	$\frac{\text{Jumlah kontribusi PDRB Sektor Perdagangan}}{\text{Jumlah PDRB}}$	Diskoperindag
			Meningkatnya kunjungan wisatawan	Peningkatan wisatawan	%	$\frac{\text{Jumlah wisatawan tahun } n - \text{Jumlah wisatawan tahun } (n - 1)}{\text{Jumlah wisatawan tahun } (n - 1)} \times 100\%$	Disparpora
8.	Meningkatkan kualitas tenaga kerja guna mengurangi pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka	Menurunnya tingkat pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	$\frac{\text{Jumlah Pengangguran}}{\text{Jumlah Angkatan Kerja}} \times 100\%$	Disnaker (Sumber data: BPS)
9.	Menurunkan angka kemiskinan di Kabupaten Pematang	Persentase penduduk miskin	Menurunnya penduduk miskin	Persentase penduduk miskin	%	$\frac{\text{Jumlah penduduk miskin}}{\text{Jumlah Penduduk}} \times 100\%$	Bappeda Sumber data: BPS

Misi 4: Meningkatkan sarana prasarana dasar serta memperkuat sentra-sentra produksi berbasis kewilayahan sesuai dengan karakteristik dan potensi wilayah

No.	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	FORMULASI / RUMUS PERHITUNGAN	PENANGGUNGJAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8
10.	Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur dasar dan penunjang secara merata.		Meningkatnya kualitas infrastruktur dasar dan penunjang secara merata.	Persentase jalan dalam kondisi baik	%	$\frac{\text{Jalan dalam kondisi baik}}{\text{panjang jalan secara keseluruhan}} \times 100\%$	DPU TR
				Persentase jembatan dalam kondisi baik	%	$\frac{\text{Jembatan dalam kondisi baik}}{\text{Jumlah jembatan secara keseluruhan}} \times 100\%$	DPU TR
				Persentase saluran irigasi dalam kondisi baik	%	$\frac{\text{Irigasi dalam kondisi baik}}{\text{panjang irigasi secara keseluruhan}} \times 100\%$	DPU TR
				Cakupan rumah tangga yang mendapatkan pelayanan air minum	%	$\frac{\text{Jumlah masyarakat yang terlayani}}{\text{proyeksi total masyarakat}} \times 100\%$	DPU TR
				Persentase saluran drainase dalam kondisi baik	%	$\frac{\text{Panjang drainase dalam kondisi baik(dalam km)}}{\text{Panjang seluruh drainase di wilayah perkotaan}} \times 100\%$	DPU TR
				Persentase RTLH	%	$\frac{\text{Jumlah rumah tidak layak huni tertangani}}{\text{Jumlah rumah tidak layak huni}} \times 100\%$	Disperkim
				Cakupan Wilayah Kumuh	%	$\frac{\text{Luas wilayah kumuh} - \text{Luas wilayah kumuh yang tertangani hingga tahun n}}{\text{Jumlah wilayah kumuh}} \times 100\%$	Disperkim
11.	Meningkatkan kemudahan akses transportasi masyarakat	Ketersediaan rambu-rambu lalu lintas	Meningkatnya ketersediaan sarana transportasi umum bagi masyarakat	Ketersediaan rambu-rambu lalu lintas	%	$\frac{\text{Jumlah rambu} - \text{rambu yang ada}}{\text{Jumlah rambu} - \text{rambu yang seharusnya}} \times 100\%$	Dishub

No.	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	FORMULASI / RUMUS PERHITUNGAN	PENANGGUNGJAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8
12.	Meningkatkan kelestarian lingkungan sehingga dapat menjalankan fungsinya sebagai penopang kehidupan	Persentase usaha yang memiliki ketaatan terhadap pencemaran air dan udara dari sumber tidak bergerak	Terkendalinya pencemaran dan kerusakan lingkungan	Persentase usaha yang memiliki ketaatan terhadap pencemaran air dan udara dari sumber tidak bergerak	%	$\frac{\text{Jumlah usaha wajib AMDAL dan UKL - UPL}}{\text{jumlah perusahaan yang seharusnya wajib AMDAL dan UKL - UPL}} \times 100\%$	DLH

Misi 5: Mewujudkan kehidupan masyarakat yang agamis, toleran, harmonis, dan saling menghormati

No.	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	FORMULASI / RUMUS PERHITUNGAN	PENANGGUNGJAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8
13.	Meningkatkan toleransi dan hubungan beragama yang harmonis dan saling menghormati dalam kehidupan masyarakat	Persentase penurunan konflik sosial	Terciptanya kehidupan beragama yang rukun dan damai	Persentase penurunan konflik sosial	%	$\frac{\text{Jumlah konflik sosial tahun } n}{\text{jumlah konflik sosial tahun } (n - 1)} \times 100\%$	Satpol PP


Misi 6: Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, penegakan supremasi hukum serta kemudahan investasi dan daya saing daerah

No.	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	FORMULASI / RUMUS PERHITUNGAN	PENANGGUNGJAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8
14	Meningkatkan realisasi investasi yang didukung iklim investasi yang kondusif	Nilai investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)	Meningkatnya nilai realisasi investasi	Nilai investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)	Rupiah (Rp)	Jumlah Realisasi Investasi	Dinas PMPTSP
15.	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagai wujud pelayanan publik yang prima dan perbaikan citra publik	Hasil Opini BPK terhadap laporan keuangan daerah	Meningkatnya kapasitas Aparatur dalam meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan	Hasil Opini BPK terhadap laporan keuangan daerah	Nilai	Nilai Hasil Opini BPK terhadap laporan keuangan daerah	BPKAD
		Rata-rata Skor SKM	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Rata-rata Skor Survey Kepuasan Masyarakat pada PD Pelayanan Publik	Skor	$\frac{\text{Jumlah Skor SKM seluruh Yanblik}}{\text{Jumlah Yanblik}}$	Setda
17.	Meningkatkan kualitas jaringan telekomunikasi dan informasi guna menunjang pelayanan publik	Cakupan pelayanan TI bagi masyarakat	Meningkatnya kemudahan masyarakat dalam mengakses informasi	Cakupan pelayanan TI bagi masyarakat	Titik Hotspot	Jumlah Titik Hotspot yang terbangun	Diskominfo

Misi 7: Menumbuhkan kembali budaya asli daerah sebagai landasan pembentukan jati diri dan kepribadian masyarakat

No	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	Satuan	FORMULASI / RUMUS PERHITUNGAN	PENANGGUNGJAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Menumbuhkembangkan Budaya Asli Kabupaten Pemalang sebagai kekayaan non ragawi dan Jati Diri Pemalang	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	Meningkatnya kelestarian nilai-nilai Budaya, Seni, dan kekayaan budaya Asli Pemalang	Cakupan kelompok seni yang dibina	%	$\frac{\text{Jumlah kelompok kesenian yang dibina}}{\text{jumlah kelompok kesenian secara keseluruhan}} \times 100\%$	Dindikbud
				Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	%	$\frac{\text{Jumlah benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan}}{\text{Jumlah benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dimiliki oleh daerah}} \times 100\%$	Dindikbud

BUPATI PEMALANG,



JUNAEDI

LAMPIRAN II

PERATURAN BUPATI PEMALANG

NOMOR 58 TAHUN 2018

TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI PEMALANG NOMOR 26 TAHUN 2016 TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG DAN INDIKTOR KINERJA UTAMA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2016 – 2021

**INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
TAHUN 2016 – 2021**

A. SEKRETARIAT DAERAH

NO.	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULASI/RUMUSAN PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB (BIDANG)
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya perkembangan perekonomian, usaha daerah dan sektor informal yang lebih produktif dan kompetitif melalui kerjasama dan iklim investasi yang baik	Akumulasi laba perusda per tahun (Milyar Rupiah)	Rp	Akumulasi laba perusda per tahun (Milyar Rupiah)	BAGIAN PEREKONOMIAN & SDA
2.	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	Nilai LPPD	Nilai	Nilai LPPD yang diperoleh	BAGIAN TATA PEMERINTAHAN
3.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah	Nilai evaluasi AKIP Setda	Nilai	Nilai evaluasi AKIP Setda yang diperoleh	SEMUA BAGIAN PADA SETDA
		Nilai evaluasi AKIP Pemda komponen pelaporan kinerja	Nilai	Nilai evaluasi AKIP Pemda komponen pelaporan kinerja yang diperoleh	BAGIAN PP & RB
4.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Rata-rata skor survey kepuasan masyarakat pada PD pelayanan publik	skor	Rata-rata skor survey kepuasan masyarakat pada PD pelayanan publik	BAGIAN PP & RB
5.	Meningkatnya kualitas organisasi dan ketatalaksanaan pemerintah daerah.	Persentase kewenangan daerah yang sesuai tupoksi dibanding dengan seluruh kewenangan	%	$\frac{\text{jumlah OPD yang dibentuk dg kewenangan UU No. 23 tahun 2014 dan PP 18 tahun 2016}}{\text{jumlah OPD secara keseluruhan}} \times 100\%$	BAGIAN ORGANISASI
6.	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat dan kerukunan hidup antar umat beragama.	Persentase kebijakan pemerintah daerah bidang sosial, keagamaan dan penanggulangan kemiskinan yang dimonitor dan dievaluasi	%	$\frac{\text{jumlah kebijakan bidang sosial, keagamaan dan penanggulangan kemiskinan yg dilaksanakan}}{\text{jumlah seluruh kebijakan bidang sosial, keagamaan dan penanggulangan kemiskinan}} \times 100\%$	BAGIAN KESRA

NO.	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULASI/RUMUSAN PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB (BIDANG)
1	2	3	4	5	6
7.	Meningkatnya pengendalian pembangunan daerah	Persentase kegiatan/ paket pekerjaan konstruksi yang dimonitoring dan dievaluasi	%	$\frac{\text{jumlah kegiatan atau paket pekerjaan konstruksi yang dimonitor dan dievaluasi}}{\text{jumlah kegiatan atau paket pekerjaan yang ada}} \times 100\%$	BAGIAN PEMBANGUNAN
8.	Terwujudnya harmonisasi dan sinkronisasi rancangan produk hukum yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, kebutuhan masyarakat dan penyelenggaraan pemerintah daerah	Persentase usulan Raperda yang menjadi Perda	%	$\frac{\text{jumlah usulan Raperda yg ditetapkan menjadi Perda}}{\text{jumlah usulan Raperda yang masuk}} \times 100\%$	BAGIAN HUKUM

B. SEKRETARIAT DPRD

NO.	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULASI/RUMUSAN PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB (BIDANG)
1	2	3	4	5	6
1.	Dilaksanakannya pembahasan produk-produk hukum sesuai aspirasi masyarakat dan ketentuan peraturan perundang-undangan	Perda yang ditetapkan	Buah	Jumlah Perda yang ditetapkan	BAGIAN PERSIDANGAN
		Raperda yang disetujui DPRD	%	$\frac{\text{Jumlah Raperda yang disetujui DPRD}}{\text{Jumlah Raperda yang diusulkan}} \times 100\%$	
		Keputusan DPRD yang ditindaklanjuti	%	$\frac{\text{Jumlah keputusan DPRD yang ditindaklanjuti oleh DPRD}}{\text{Jumlah keputusan DPRD yang dihasilkan}} \times 100\%$	

C. INSPEKTORAT

NO.	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULASI/RUMUSAN PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB (BIDANG)
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya kualitas perencanaan dan pembangunan daerah serta pelaporan kinerja pemerintahan daerah	Persentase PD yang mempunyai nilai evaluasi SAKIP B ke atas	%	$\frac{\text{Jumlah OPD yang nilai evaluasi SAKIP B ke atas}}{\text{Total OPD yang dievaluasi}} \times 100\%$	INSPEKTORAT
2.	Terwujudnya sistem pengendalian intern pemerintah.	Implementasi penyelenggaraan SPIP	Level	Level SPIP yang diperoleh	INSPEKTORAT

NO.	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULASI/RUMUSAN PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB (BIDANG)
1	2	3	4	5	6
3.	Meningkatnya level kapabilitas APIP	Level kapabilitas APIP Inspektorat Kabupaten Pemalang	Level	Level kapabilitas APIP Inspektorat Kabupaten Pemalang	INSPEKTORAT

D. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

NO.	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULASI/RUMUSAN PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB (BIDANG)
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Tingkat keselarasan antara program RKPD dengan RPJMD	%	$\frac{\text{Jumlah Program RPJMD yang tercantum dalam RKPD}}{\text{Jumlah seluruh Program yang tercantum dalam RKPD}} \times 100\%$	BAPPEDA
		Nilai evaluasi AKIP komponen perencanaan kinerja	Nilai	Nilai evaluasi AKIP komponen perencanaan kinerja	BAPPEDA
		Persentase Prioritas Usulan Hasil Musrenbang yang diakomodir dalam RKPD	%	$\frac{\text{Jumlah Usulan kegiatan prioritas yang terhimpun dalam Musrenbang}}{\text{Jumlah usulan kegiatan yang tercantum dalam RKPD}} \times 100\%$	BAPPEDA
2.	Meningkatnya dukungan penelitian dan pengembangan kebijakan pembangunan	Prosentase pemenuhan kebutuhan dokumen perencanaan pembangunan bidang penelitian, pengembangan	%	$\frac{\text{Dokumen perencanaan pembangunan bidang penelitian pengembangan yang dibutuhkan}}{\text{Dokumen perencanaan pembangunan bidang penelitian pengembangan yang ada}} \times 100\%$	BAPPEDA
		Jumlah kegiatan fasilitasi kegiatan Penelitian dan Inovasi di Kabupaten Pemalang	Kegiatan	Jumlah Kegiatan Penelitian dan Inovasi yang difasilitasi	BAPPEDA

E. BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

NO.	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULASI/RUMUSAN PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB (BIDANG)
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya kualitas sumber daya aparatur	Persentase Aparatur Sipil Negara yang mengikuti diklat	%	$\frac{\text{Jumlah Aparatur Sipil Negara yang mengikuti Diklat}}{\text{Jumlah Aparatur Sipil Negara}} \times 100\%$	BIDANG PENGEMBANGAN APARATUR
2.	Terwujudnya sumber daya aparatur yang profesional melalui penataan atas dasar kebutuhan/kompetensi/sistem karier	Persentase Aparatur Sipil Negara yang mengikuti Assessment (uji kompetensi) sebagai bahan pertimbangan tim baperjakat	%	$\frac{\text{Jumlah Aparatur Sipil Negara yang mengikuti assesment}}{\text{Jumlah Aparatur Sipil Negara yang memenuhi syarat jabatan}} \times 100\%$	BIDANG PENGEMBANGAN APARATUR BIDANG JABATAN DAN PENILAIAN KINERJA
		Persentase ASN yang dilakukan penataan	%	$\frac{\text{Jumlah Aparatur Sipil Negara yang mutasi}}{\text{Jumlah Aparatur Sipil Negara}} \times 100\%$	BIDANG MUTASI DAN PEMBINAAN
3.	Terwujudnya layanan kepegawaian yang dapat cepat, tepat, berbasis teknologi informasi dan komunikasi dengan dukungan database PNS yang akurat yang dapat dipakai sebagai bahan	Persentase pembangunan/pengembangan informasi kepegawaian berbasis teknologi informasi	%	$\frac{\text{Jumlah aplikasi yang dibangun atau dikembangkan pada tahun n}}{\text{Jumlah aplikasi yang dibangun atau dikembangkan selama periode RPJMD}} \times 100\%$	BIDANG JABATAN DAN PENILAIAN KINERJA

F. DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA

NO.	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULASI/RUMUSAN PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB (BIDANG)
1.	Meningkatnya jumlah desa tertib administrasi	Persentase peningkatan desa tertib administrasi pemerintahan desa	%	$\frac{\text{Jumlah desa tertib administrasi desa}}{\text{Jumlah seluruh Desa}} \times 100\%$	Bidang Pemerintahan Desa
2.	Meningkatnya fungsi lembaga kemasyarakatan desa dalam pembangunan desa	Persentase jumlah lembaga kemasyarakatan desa yang terbina	%	$\frac{\text{Jumlah lembaga kemasyarakatan desa yang terbina}}{\text{Jumlah seluruh lembaga kemasyarakatan desa}} \times 100\%$	Bidang Pemberdayaan Ekonomi Kerjasama Desa dan Kelembagaan
3.	Meningkatnya peran dan fungsi lembaga ekonomi desa	Persentase Lembaga Ekonomi Masyarakat Desa yang terbina	%	$\frac{\text{Jumlah lembaga ekonomi desa yang terbina}}{\text{Jumlah seluruh lembaga ekonomi desa aktif}} \times 100\%$	Bidang Pemberdayaan Ekonomi Kerjasama Desa dan Kelembagaan

G. DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NO.	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULASI/RUMUSAN PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB (BIDANG)
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam menempuh pendidikan pada jenjang PAUD dan pendidikan dasar	Harapan Lama Sekolah (HLS), (BPS)	Tahun	$HLS_a^t = FK \times \sum_{i=a}^n \frac{E_i^t}{P_i^t}$	DINDIKBUD (Sumber data: BPS)
		Rata-rata Lama Sekolah (BPS)	Tahun	Kombinasi antara partisipasi sekolah, jenjang pendidikan yang sedang dijalani, kelas yang diduduki, dan pendidikan yang ditamatkan	DINDIKBUD (Sumber data: BPS)
		Angka Kelulusan SD/MI	%	$\frac{\text{Jumlah lulusan pada Jenjang SD/MI}}{\text{Jumlah Siswa Tingkat Tertinggi pada Jenjang SD/MI pada tahun sebelumnya}} \times 100\%$	BIDANG PEMBINAAN KETENAGAAN BIDANG PEMBINAAN PENDIDIKAN DASAR BIDANG PEMBINAAN PAUD & DIKMAS BIDANG SARANA & PRASARANA
		Angka Kelulusan SMP/Mts	%	$\frac{\text{Jumlah lulusan pada Jenjang SMP/Mts}}{\text{Jumlah Siswa Tingkat Tertinggi pada Jenjang SMP/Mts pada tahun sebelumnya}} \times 100\%$	
		Angka Melanjutkan SD/MI	%	$\frac{\text{Jumlah siswa baru tingkat I pada jenjang SMP/MTs}}{\text{Jumlah lulusan pada jenjang SD atau MI Tahun ajaran sebelumnya}} \times 100\%$	
		Angka Melanjutkan SMP/MTs	%	$\frac{\text{Jumlah siswa baru tingkat I pada SMP/SMK/MA}}{\text{Jumlah lulusan pada jenjang SMP/MTs Tahun ajaran sebelumnya}} \times 100\%$	
2.	Meningkatnya kelestarian nilai - nilai Budaya, seni dan kekayaan budaya asli Pemalang	Cakupan kelompok seni yang aktif	%	$\frac{\text{Jumlah kelompok seni yang aktif}}{\text{Total jumlah kelompok seni}} \times 100 \%$	BIDANG KEBUDAYAAN
		Benda,situs dan kawasan cagar budaya yang di lestarikan	%	$\frac{\text{Jumlah benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan}}{\text{Total jumlah benda, situs dan kawasan cagar budaya}} \times 100 \%$	

H. DINAS KESEHATAN

NO.	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULASI/RUMUSAN PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB (BIDANG)
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya pelayanan kesehatan bagi masyarakat	Usia Harapan Hidup (UHH)	tahun	Angka perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur	DINAS KESEHATAN (Sumber data: BPS)
2.	Meningkatnya pelayanan kesehatan ibu	Angka Kematian Ibu (AKI)	Per 100.000 KH	$\frac{\text{Jumlah kematian ibu akibat dari proses kehamilan, persalinan, dan paska persalinan}}{\text{Jumlah kelahiran hidup dalam waktu yang sama}} \times 100.000$	DINAS KESEHATAN
3.	Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan anak dan balita	Angka Kematian Bayi (AKB)	Per 1.000 KH	$\frac{\text{Jumlah kematian bayi (berumur kurang dari usia 1 tahun)}}{\text{Jumlah kelahiran hidup dalam waktu yang sama}} \times 1.000$	DINAS KESEHATAN
		Angka Keamatan Balita (AKABA)	Per 1.000 KH	$\frac{\text{Jumlah kematian anak (berumur kurang dari 5 tahun)}}{\text{Jumlah kelahiran hidup dalam waktu yang sama}} \times 1.000$	DINAS KESEHATAN
4.	Meningkatnya gizi keluarga dan masyarakat	Persentase Balita Gizi Buruk	%	$\frac{\text{Jumlah Balita Gizi Buruk}}{\text{Jumlah Balita di 1 wilayah pada kurun waktu yang sama}} \times 100 \%$	DINAS KESEHATAN

I. DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

NO.	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULASI/RUMUSAN PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB (BIDANG)
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya penanganan pemberian jaminan sosial bagi PMKS	Persentase PMKS yang mendapatkan bantuan sosial	%	$\frac{\text{Jumlah PMKS yang mendapatkan bantuan}}{\text{Jumlah PMKS yang menjadi kewenangan}} \times 100$	BIDANG SOSIAL
2.	Meningkatnya kualitas hidup perempuan dan partisipasi perempuan dalam ranah publik	Rasio KDRT	%	$\frac{\text{Jumlah KDRT}}{\text{Jumlah rumah tangga}} \times 100$	BIDANG SOSIAL
3.	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam ber-KB	Cakupan peserta KB Aktif	%	$\frac{\text{Jumlah peserta Program KB aktif}}{\text{Jumlah peserta Program KB}} \times 100\%$	DINSOS KB PP

J. DINAS TENAGA KERJA

NO.	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULASI/RUMUSAN PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB (BIDANG)
1	2	3	4	5	6
1.	Menurunnya tingkat pengangguran	Persentase tingkat pengangguran terbuka	%	$\frac{\text{Jumlah pengangguran terbuka}}{\text{Jumlah angkatan kerja}} \times 100$	DISNAKER (Sumber data: BPS)
2.	Meningkatnya jumlah pencari kerja yang mendapat pelatihan kerja	Persentase pencari kerja yang mendapatkan pelatihan kerja	%	$\frac{\text{Jumlah pencari kerja yang mendapat pelatihan kerja}}{\text{Jumlah pencari kerja yang mendaftar pelatihan kerja}} \times 100$	BIDANG PENEMPATAN TENAGA KERJA
3.	Meningkatnya akreditasi dan perijinan lembaga pelatihan kerja	Jumlah LPK milik pemerintah, perusahaan dan milik swasta yang mendapatkan pembinaan	LPK	Jumlah LPK milik pemerintah, perusahaan dan milik swasta yang mendapatkan pembinaan	BIDANG PENEMPATAN TENAGA KERJA, PELATIHAN DAN TRANSMIGRASI
4.	Meningkatnya penempatan tenaga kerja di dalam dan di luar negeri	Persentase jumlah tenaga kerja yang ditempatkan	%	$\frac{\text{Jumlah pencari kerja yang ditempatkan}}{\text{Jumlah pencari kerja}} \times 100$	BIDANG PENEMPATAN TENAGA KERJA, PELATIHAN DAN TRANSMIGRASI
5.	Meningkatkan hubungan industrial dan perlindungan tenaga kerja	Persentase jumlah pekerja/buruh yang menjadi peserta program BPJS ketenagakerjaan	%	$\frac{\text{Jumlah pekerja/buruh peserta BPJS}}{\text{Jumlah tenaga kerja}} \times 100\%$	BIDANG PEMBINAAN HUBUNGAN INDUSTRIAL, SYARAT KERJA DAN JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA
6.	Meningkatnya kuantitas, kualitas Program Transmigrasi	Jumlah (KK) yang ditempatkan	%	Jumlah KK yang diberangkatkan ke daerah transmigrasi	BIDANG PENEMPATAN TENAGA KERJA, PELATIHAN DAN TRANSMIGRASI

K. DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

NO.	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULASI/RUMUSAN PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB (BIDANG)
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya cakupan kepemilikan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.	Persentase penduduk ber-KTP persatuan penduduk	%	$\frac{\text{Jumlah penduduk usia 17 tahun keatas yang ber KTP}}{\text{Jumlah penduduk usia 17 tahun keatas atau telah menikah}} \times 100 \%$	DISDUKCATPIL
		Persentase anak berakte kelahiran	%	$\frac{\text{Jumlah anak (usia 0 – 18 tahun) yang memiliki akte kelahiran}}{\text{Jumlah penduduk (0 – 18)}} \times 100 \%$	
		Persentase kepemilikan akte kelahiran	%	$\frac{\text{Jumlah penduduk yang memiliki akta kelahiran}}{\text{Jumlah penduduk (usia 0 – 18 tahun)}} \times 100 \%$	
		Persentase pasangan berakta nikah	%	$\frac{\text{Jumlah pasangan nikah berakta nikah}}{\text{Jumlah keseluruhan pasangan yang telah menikah}} \times 100 \%$	
2.	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan administrasi kependudukan	Nilai kepuasan masyarakat terhadap pelayanan administrasi kependudukan	Skor	Skor SKM yang diperoleh	

L. DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

NO.	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULASI/RUMUSAN PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB (BIDANG)
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya peran dan kualitas koperasi dan UMKM	Persentase koperasi sehat	%	$\frac{\text{Jumlah koperasi sehat di Kab Pematang tahun } n}{\text{Jumlah koperasi sehat yang dinilai tahun } n} \times 100 \%$	BIDANG KOPERASI DAN UMKM
2.	Meningkatnya Pertumbuhan IKM yang berbahan baku lokal guna mendorong pertumbuhan ekonomi daerah	Persentase Pertumbuhan IKM	%	$\frac{\text{Jumlah IKM tahun } n - \text{Jumlah IKM tahun } n - 1}{\text{Jumlah IKM tahun } n - 1} \times 100 \%$	BIDANG INDUSTRI
3.	Meningkatnya peran usaha sektor perdagangan dalam menggerakkan pertumbuhan ekonomi daerah	Persentase pertumbuhan kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	%	$\frac{\text{Pertumbuhan PDRB tahun } n - \text{Pertumbuhan PDRB tahun } n - 1}{\text{Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan tahun } n - 1} \times 100 \%$	BIDANG PERDAGANGAN
4.	Meningkatnya kualitas pasar daerah melalui pembangunan, rehabilitasi dan revitalisasi pasar.	Persentase pasar daerah yang direhabilitasi	%	$\frac{\text{Jumlah pasar daerah yang direhabilitasi pd tahun } n}{\text{Jumlah seluruh pasar daerah}} \times 100 \%$	BIDANG PASAR

M. DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA

NO.	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULASI/RUMUSAN PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB (BIDANG)
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya kunjungan wisata ke Kabupaten Pematang	Persentase peningkatan kunjungan wisata	%	$\frac{\text{Jumlah wisatawan tahun } n - \text{Jumlah wisatawan tahun } n - 1}{\text{Jumlah wisatawan tahun } n - 1} \times 100 \%$	DISPARPORA
2.	Meningkatnya jumlah pemuda yang berprestasi	Pemuda yang berprestasi	Kelompok	Jumlah kelompok pemuda berprestasi yang dibina	BIDANG PEMUDA & OLAHRAGA
3.	Meningkatnya prestasi cabang olahraga	Jumlah prestasi yang diraih	Cabang olahraga	Jumlah prestasi cabang olahraga yang diraih	BIDANG PEMUDA & OLAHRAGA

N. DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

NO.	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULASI/RUMUSAN PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB (BIDANG)
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya kuantitas dan kualitas infrastruktur dasar dan penunjang secara merata	Persentase jalan dalam kondisi baik	%	$\frac{\text{Jalan kabupaten dalam kondisi baik}}{\text{Jumlah panjang seluruh jalan kabupaten yang ada}} \times 100 \%$	BIDANG BINA MARGA
		Persentase jembatan dalam kondisi baik	%	$\frac{\text{Jembatan kabupaten dalam kondisi baik}}{\text{Jumlah panjang seluruh jembatan kabupaten yang ada}} \times 100 \%$	BIDANG BINA MARGA
		Persentase saluran irigasi dalam kondisi baik	%	$\frac{\text{Panjang saluran irigasi dalam kondisi baik}}{\text{Panjang saluran irigasi secara keseluruhan}} \times 100 \%$	BIDANG SDAME
		Persentase saluran drainase dalam kondisi baik	%	$\frac{\text{Panjang drainase dalam kondisi baik (km)}}{\text{Panjang seluruh drainase di wilayah perkotaan}} \times 100 \%$	BIDANG JASA KONSTRUKSI, CIPTA KARYA DAN TARU
		Cakupan rumah tangga yang mendapatkan pelayanan air minum	%	$\frac{\text{Jumlah masyarakat yang terlayani}}{\text{Proyeksi total masyarakat}} \times 100 \%$	BIDANG JASA KONSTRUKSI, CIPTA KARYA DAN TARU

O. DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO.	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULASI/RUMUSAN PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB (BIDANG)
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya kualitas perumahan dan sarana prasarannya	Persentase RTLH yang direhabilitasi/ditangani	%	$\frac{\text{Jumlah rumah tidak layak huni tertangani}}{\text{Jumlah rumat tidak layak huni}} \times 100 \%$	BIDANG KAWASAN PERMUKIMAN
2.	Meningkatnya kualitas kawasan permukiman	Persentase luas kawasan kumuh	%	$\frac{\text{Luas wilayah permukiman kumuh yang tertangani}}{\text{Jumlah total luasan wilayah kumuh yang telah ditetapkan}} \times 100 \%$	BIDANG KAWASAN PERMUKIMAN

P. DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

NO.	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULASI/RUMUSAN PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB (BIDANG)
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya layanan informasi dan aspirasi publik	Persentase layanan pengaduan masyarakat secara online yang ditindaklanjuti tepat waktu	%	$\frac{\text{Jumlah pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah pengaduan masyarakat yang masuk}} \times 100 \%$	BIDANG PENGELOLAAN KOMUNIKASI DAN INFORMASI
		Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik	Nilai	Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik dari Pemerintah Pusat/Propinsi	BIDANG PENGELOLAAN KOMUNIKASI DAN INFORMASI (Sumber data: Komisi Informasi Jawa Tengah)
		Tingkat Pemenuhan Informasi Publik pada Website <i>pemalangkab.go.id</i> dan website OPD	%	$\frac{\text{Jumlah informasi publik pada website resmi Pemda Pemalang dan website PD}}{\text{Jumlah Perangkat Daerah}} \times 100 \%$	BIDANG PENYELENGGARAAN E-GOVERNMENT
2.	Meningkatnya layanan telekomunikasi dan Informatika.	Tersedianya data Center dengan NOC berstandar	%	$\frac{\text{Jumlah aplikasi yang tersedia}}{\text{Kapasitas server yang tersedia}} \times 100 \%$	BIDANG PENYELENGGARAAN E-GOVERNMENT
		Penilaian Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Indeks SPBE)	Nilai	Nilai/Skor Sistem Pemerintahan Basis Elektronik	BIDANG PENYELENGGARAAN E-GOVERNMENT
		Pemenuhan sistem manajemen pengamanan informasi	Sertifikat	Sertifikasi Pengamanan Informasi	BIDANG PENGELOLAAN KOMUNIKASI DAN INFORMASI

NO.	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULASI/RUMUSAN PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB (BIDANG)
1	2	3	4	5	6
3.	Ketersediaan sistem data dan statistik yang terintegrasi	Tersedianya data statistik terintegrasi	%	$\frac{\text{Jumlah data statistik yang terintegrasi}}{\text{Jumlah data statistik}} \times 100\%$	BIDANG POS, TELEKOMUNIKASI & STATISTIK

Q. DINAS PERHUBUNGAN

NO.	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULASI/RUMUSAN PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB (BIDANG)
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya ketersediaan sarana transportasi umum bagi masyarakat	Persentase ketersediaan angkutan umum	%	$\frac{\text{Jumlah Angkutan umum}}{\text{Jumlah Penumpang}} \times 100\%$	BIDANG ANGKUTAN
2.	Meningkatnya infrastruktur, sarana, prasarana dan fasilitas perhubungan	Persentase tersedianya terminal angkutan penumpang yang tersedia di Kabupaten	%	$\frac{\text{Tersedianya pembangunan terminal angkutan penumpang}}{\text{Kebutuhan terminal angkutan penumpang}} \times 100\%$	BIDANG ANGKUTAN
		Persentase Ketersediaan rambu-rambu lalu lintas	%	$\frac{\text{Jumlah rambu – rambu yang ada}}{\text{Jumlah Rambu – rambu seharusnya}} \times 100\%$	BIDANG LALU LINTAS

R. DINAS PERTANIAN

NO.	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULASI/RUMUSAN PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB (BIDANG)
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya produksi pertanian/perkebunan	Produktivitas padi	Kw/Ha	$\frac{\text{Produksi padi (ton)}}{\text{Luas areal panen padi}} \times 10$	BIDANG PERKEBUNAN
		Produksi komoditas perkebunan utama	Ton	Jumlah produksi komoditas perkebunan	BIDANG PERKEBUNAN
2.	Meningkatnya produksi hasil peternakan	Produksi peternakan	Kg	Jumlah produksi hasil peternakan	BIDANG PETERNAKAN
3.	Meningkatnya ketersediaan dan cadangan pangan dengan mengoptimalkan sumberdaya yang dimilikinya/ dikuasainya secara berkelanjutan	Ketersediaan pangan utama : a. Ketersediaan energi perkapita	Kkal/kap/hr	$\frac{\text{Jumlah bahan makanan yang tersedia dikonsumsi penduduk per kap/hr} \times \text{BDD} \times \text{Kand Kalori}}{100}$	BIDANG KETAHANAN PANGAN

NO.	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULASI/RUMUSAN PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB (BIDANG)
1	2	3	4	5	6
		b. Ketersediaan protein perkapita	Gr/kap/hr	Jumlah bahan makanan yang tersedia dikonsumsi penduduk per kap/hr x BDD x Kand protein $\frac{\text{Jumlah bahan makanan yang tersedia dikonsumsi penduduk per kap/hr} \times \text{BDD} \times \text{Kand protein}}{100}$	BIDANG KETAHANAN PANGAN
		Cadangan pangan pemerintah	ton	Jumlah cadangan pangan yang tersedia selama 5 tahun periode RPJMD	BIDANG KETAHANAN PANGAN
4.	Meningkatnya sistem penanganan keamanan pangan segar	Pola pangan Harapan	skor	% Angka Kecukupan Gizi (AKG) x Bobot masing-masing kelompok pangan Data Sensus Ekonomi Nasional (Susenas)	BIDANG KETAHANAN PANGAN (Sumber data: BPS)

S. DINAS PERIKANAN

NO.	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULASI/RUMUSAN PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB (BIDANG)
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya hasil produksi perikanan	Produksi perikanan budidaya	Kg	Produksi perikanan budidaya menunjukkan jumlah produksi budidaya perikanan	BIDANG PENGELOLAAN BUDIDAYA PERIKANAN
		Produksi perikanan tangkap	Kg	Produksi perikanan tangkap menunjukkan jumlah produksi perikanan tangkap	BIDANG PENGELOLAAN PENANGKAPAN IKAN
2.	Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan kelompok pelaku usaha perikanan	Jumlah kelompok pembudidaya ikan yang dibina	Kelompok	Jumlah kelompok pembudidaya ikan yang dibina	BIDANG PENGELOLAAN BUDIDAYA PERIKANAN
		Cakupan bina kelompok nelayan	Kelompok	Jumlah kelompok nelayan yang dibina	BIDANG PENGELOLAAN PENANGKAPAN IKAN
		Cakupan kelompok usaha pengolahan ikan yang dibina	kelompok	Jumlah kelompok usaha pengolahan ikan yang dibina	BIDANG USAHA DAN PEMASARAN

T. DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NO.	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULASI/RUMUSAN PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB (BIDANG)
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya nilai realisasi investasi	Jumlah nilai investasi beskala nasional (PMDN/PMA)	Rp	Jumlah Realisasi Investasi	DPMPTSP
2.	Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Nilai SKM	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai IKM yang diperoleh	DPMPTSP
		Persentase pengaduan pelayanan perijinan dan investasi yang ditindaklanjuti/ditangani	%	$\frac{\text{Jumlah pengaduan pelayanan perijinan dan investasi yang ditindaklanjuti/ditangani}}{\text{Jumlah pengaduan pelayanan perijinan dan investasi}} \times 100\%$	DPMPTSP

U. DINAS LINGKUNGAN HIDUP

NO.	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULASI/RUMUSAN PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB (BIDANG)
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya usaha dan/atau kegiatan yang memiliki dokumen dan izin lingkungan	Persentase jumlah AMDAL, UKL - UPL yang dilayani	%	$\frac{\text{Jumlah UKL - UPL yang dilayani}}{\text{Jumlah pemohon UKL - UPL}} \times 100\%$	DLH
2.	Tersedianya layanan infrastruktur yang mendukung peningkatan paengelolaan persampahan	Persentase sampah perkotaan yang tertangani	%	$\frac{\text{Jumlah sampah yang ditangani}}{\text{Jumlah timbunan sampah}} \times 100\%$	DLH
3.	Meningkatnya Ijin Pembuangan limbah Cair	Persentase jumlah usaha dan/atau kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan teknik pencegahan pencemaran air	%	$\frac{\text{Jumlah usaha yang mentaati persyaratan administrasi dan teknik pencegahan pencemaran air}}{\text{Jumlah usaha yang mengajukan izin}} \times 100\%$	DLH
4.	Meningkatkan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah	Persentase pengurangan sampah	%	$\frac{\text{Jumlah sampah yang dikurangi}}{\text{Jumlah timbunan sampah}} \times 100\%$	DLH
5.	Meningkatnya kualitas dan kuantitas layanan Persampahan	Volume Pengangkutan Sampah	%	Jumlah sampah yang terangkut (ton)	DLH
6.	Meningkatnya Prasarana dan sarana laboratorium serta akreditasi status laboratorium	Tersedianya Laboratorium Penelitian Lingkungan	%	Jumlah unit laboratorium lingkungan	DLH
7.	Tersedianya Data dan Informasi Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	%	$\frac{\text{Nilai Indeks Pencemaran Air} + \text{Nilai Indeks Pencemaran Udara} + \text{Nilai Indeks Pencemaran Vegetasi}}{3}$	DLH

NO.	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULASI/RUMUSAN PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB (BIDANG)
1	2	3	4	5	6
				3	
8.	Meningkatnya Tegakan Tanaman pada Daerah Tangkapan Air dan Kawasan Rawan Bencana	Rehabiltasi Lahan Kritis	%	$\frac{\text{Luas jumlah luas kerusakan penambangan yang terrehabilitasi}}{\text{Luas jumlah luas kerusakan penambangan yang harus terrehabilitasi}} \times 100\%$	DLH

V. DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

NO.	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULASI/RUMUSAN PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB (BIDANG)
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya sarana dan prasarana perpustakaan	Jumlah perpustakaan yang dapat diakses secara langsung oleh masyarakat yang beroperasi di wilayah pemerintah daerah	Unit	<p>Jumlah perpustakaan yang dapat diakses secara langsung oleh masyarakat, yang meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Perpustakaan Umum - Perpustakaan Kecamatan - Perpustakaan Desa/Kelurahan - Perpustakaan Masyarakat (TBM-Taman Baca Masyarakat) - Perpustakaan Keliling 	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.	Meningkatnya budaya gemar baca masyarakat	Angka kunjungan perpustakaan per tahun	%	$\frac{\text{Jumlah Pemustaka yang berkunjung ke perpustakaan untuk mencari bahan pustaka dalam 1 (satu) tahun}}{\text{Jumlah penduduk usia 5 - 59 tahun}} \times 100\%$ <p><i>Ket: jumlah pengunjung perpustakaan dihitung berdasarkan pengisian daftar kehadiran atau berdasarkan data yang diperoleh melalui sistem pendataan pengunjung</i></p>	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
3.	Meningkatnya koleksi perpustakaan	Tingkat Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	Judul Exemplar	<p>Jumlah koleksi judul buku yang tersedia di perpustakaan daerah</p> <p>Jumlah koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah</p>	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
4.	Terwujudnya penyelamatan, pengolahan, perlindungan dan pelestarian serta akses arsip untuk kepentingan pemerintah dan pelayanan publik	Persentase arsip yang dialihmediakan	%	$\frac{\text{Jumlah OPD yang telah menerapkan arsip secara baku}}{\text{jumlah seluruh OPD}} \times 100\%$	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
		Persentase arsip yang dimusnahkan	%	$\frac{\text{Perbandingan jumlah Desa/Kelurahan yang telah menerapkan arsip secara baku}}{\text{jumlah Desa/Kelurahan}} \times 100\%$	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

W. BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

NO.	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULASI/RUMUSAN PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB (BIDANG)
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan aset daerah	Hasil Opini BPK RI atas LKD Pemkab Pematang	Nilai	Nilai Hasil Opini BPK terhadap laporan keuangan daerah	BPKAD
		Persentase ketepatan waktu penyampaian Raperda APBD dan Raperda Perubahan APBD	%	Ketepatan waktu penyampaian Raperda APBD dan Raperda Perubahan APBD	BIDANG ANGGARAN
		Persentase SP2D yang diterbitkan tepat waktu	%	SP2D yang diterbitkan tepat waktu	BIDANG PERBENDAHARAAN
		Persentase penatausahaan aset yang memadai	%	Penatausahaan aset yang memadai	BIDANG AKUNTANSI DAN ASET DAERAH
		Persentase ketepatan waktu penyampaian Raperda pertanggungjawaban APBD	%	Ketepatan waktu penyampaian Raperda pertanggungjawaban APBD	BIDANG ANGGARAN
		Persentase ketepatan waktu penyampaian LKD ke BPK	%	Ketepatan waktu penyampaian LKD ke BPK	BIDANG AKUNTANSI DAN ASET DAERAH

X. BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

NO.	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULASI/RUMUSAN PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB (BIDANG)
1	2	3	4	5	6
1.	Terwujudnya tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan serta efisien dalam pemanfaatan APBD	Rasio realisasi PAD terhadap potensi / target PAD	%	$\frac{\text{Jumlah realisasi PAD tahun } n}{\text{Target PAD tahun } n} \times 100\%$	BAPENDA
		Peningkatan pertumbuhan PAD	%	$\frac{\text{Jumlah realisasi PAD tahun } n - \text{realisasi PAD thn } n - 1}{\text{PAD tahun } n - 1} \times 100\%$	BAPENDA

Y. BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

NO.	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULASI/RUMUSAN PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB (BIDANG)
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya kapasitas dan kapabilitas pelaku penanggulangan bencana	Jumlah Desa Tangguh	Desa	Jumlah desa yang memiliki kemampuan mandiri untuk beradaptasi dan menghadapi potensi ancaman bencana, serta memulihkan diri dengan segera dari dampak-dampak bencana yang merugikan	SEKSI PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN
2.	Meningkatnya efektivitas dan efisiensi penyusunan rencana penanggulangan bencana beserta pemantauan dan monev yang dilakukan	Persentase desa dalam kawasan rawan bencana yang terpetakan potensi/resiko bencananya	%	$\frac{\text{Jumlah Desa dalam kawasan rawan bencana yang terpetakan potensi resiko bencananya}}{\text{Jumlah desa dalam kawasan rawan bencana}} \times 100\%$	SEKSI PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN
3.	Meningkatnya pengerahan peralatan, pemberian bantuan dan logistik dalam rangka penanganan darurat bencana yang efektif dan efisien	Persentase korban bencana skala kabupaten yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap yang dilaporkan	%	$\frac{\text{Jumlah korban bencana skala kabupaten yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap yang dilaporkan}}{\text{Jumlah korban bencana yang dilaporkan}} \times 100\%$	SEKSI KEDARURATAN DAN LOGISTIK
4.	Meningkatnya penanganan darurat bagi korban bencana untuk kebutuhan dasar dan bantuan sosial yang diperlukan	Persentase korban bencana skala kabupaten yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat yang dilaporkan	%	$\frac{\text{Jumlah korban bencana skala kabupaten/kota yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat yang dilaporkan}}{\text{Jumlah korban bencana yang dilaporkan}} \times 100\%$	SEKSI KEDARURATAN DAN LOGISTIK
5.	Meningkatnya perlindungan dan pemulihan akibat dampak bencana, termasuk rehabilitasi dan rekonstruksi yang diperlukan	Cakupan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Infrastruktur Pasca Bencana Alam Lingkup Kabupaten	%	$\frac{\text{Rehabilitasi dan Rekonstruksi Infrastruktur Lingkup Kewenangan Kabupaten}}{\text{Seluruh Wilayah Pasca Bencana Alam}} \times 100\%$	SEKSI REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI
6.	Meningkatnya kapasitas pelaku penanggulangan bencana dalam tindakan hitung cepat (rapid assesment) pasca bencana	Persentase Peserta Pelatihan Penghitungan Kerusakan dan Kerugian Akibat Bencana Alam Lingkup Kabupaten yang berkompeten	%	$\frac{\text{Peserta Pelatihan Penghitungan Kerusakan dan Kerugian Akibat Bencana Alam Lingkup Kabupaten yang berkompeten}}{\text{Seluruh Peserta Pelatihan Penghitungan Kerusakan dan Kerugian Akibat Bencana Alam Lingkup Kabupaten}} \times 100\%$	SEKSI REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI

Z. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

NO.	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULASI/RUMUSAN PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB (BIDANG)
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya ketentraman, ketertiban dan kondusifitas daerah untuk menunjang investasi daerah	Cakupan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah di Kabupaten/Kota	%	$\frac{\text{Jumlah pelanggaran Perda dan/atau Peraturan Kepala Daerah yang diselesaikan di tahun bersangkutan}}{\text{Jumlah pelanggaran Perda dan/atau Peraturan Kepala Daerah yang dilaporkan dan/atau dipantau di tahun bersangkutan}} \times 100\%$	BIDANG PENEGAKAN PERUNDANG-UNDANGAN
		Persentase patroli siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	%	$\frac{\text{Banyaknya kelompok patroli x3 kali patroli dalam sehari}}{\text{Banyaknya kelompok kecamatan (jumlah wilayah kecamatan) dalam wilayah kab/kota}} \times 100\%$	BIDANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT
		Jumlah patroli petugas Satpol PP	patroli	Cakupan patroli petugas Satpol PP	
		Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk	Per 10.000	$\frac{\text{Jumlah polisi pamong praja} \times 10.000}{\text{Jumlah penduduk}}$	
		Rasio LINMAS per jumlah 10.000 penduduk	rasio	$\frac{\text{Jumlah satuan linmas dalam satu Kabupaten/kota}}{\text{jumlah RT atau sebutan lainnya dalam satu Kabupaten/Kota}}$	BIDANG PERLINDUNGAN MASYARAKAT
		Jumlah kasus konflik sosial	kasus	Jumlah kasus konflik sosial yang terjadi di masyarakat	BIDANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT
		Cakupan pelayanan bencana kebakaran di Kabupaten/Kota	%	$\frac{\text{Jumlah luas WMK Kabupaten/Kota}}{\text{Jumlah luas potensi ancaman kebakaran Kabupaten/Kota}} \times 100\%$	UPT PEMADAM KEBAKARAN
		Tingkat waktu tanggap (<i>response time rate</i>)	%	$\frac{\text{Jumlah kasus kebakaran WMK yang tertangani dalam tingkat waktu tanggap}}{\text{Jumlah kasus kebakaran dalam jangkauan WMK}} \times 100\%$	UPT PEMADAM KEBAKARAN
		Persentase aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi standar kualifikasi	%	$\frac{\text{Jumlah satgas Damkar yg memiliki sertifikasi sesuai dlm tingkat waktu tanggap}}{\text{Jumlah satgas Damkar}} \times 100\%$	UPT PEMADAM KEBAKARAN
Cakupan mobil pemadam kebakaran diatas 3000 – 5000 liter pada WMK	%	$\frac{\text{Jumlah WMK memiliki mobil dan atau mesin damkar yg laik pakai waktu tanggap}}{\text{Jumlah WMK atau lingkungan dan atau kawasan berpotensi kebakaran}} \times 100\%$	UPT PEMADAM KEBAKARAN		

AA. KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT


NO.	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULASI/RUMUSAN PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB (BIDANG)
1	2	3	4	5	6
1.	Terciptanya ketertiban dan keamanan lingkungan masyarakat	Cakupan Penanganan Keamanan, Ketertiban dan Kenyamanan Lingkungan	%	$\frac{\text{Jumlah penanganan Keamanan, Ketertiban dan Kenyamanan Lingkungan}}{\text{Jumlah seluruh gangguan Keamanan, Ketertiban dan Kenyamanan Lingkungan yang dilaporkan}} \times 100\%$	SEKSI KESATUAN DAN KETAHANAN BANGSA
2.	Terciptanya kehidupan masyarakat yang saling menghargai dan menghormati keyakinan dan keragaman etnis	Cakupan pembinaan terhadap kerukunan umat beragama dan keragaman etnis	%	$\frac{\text{Jumlah Penanganan konflik rumah ibadah(IMB), SARA}}{\text{Jumlah konflik rumah ibadah(IMB), SARA}} \times 100\%$	SEKSI POLITIK DALAM NEGERI
3.	Terwujudnya masyarakat yang berjiwa nasionalisme tinggi	Cakupan penanaman nilai luhur dan budaya bangsa kepada masyarakat melalui kegiatan peringatan hari besar nasional dan nilai-nilai perjuangan daerah	%	$\frac{\text{Jumlah hari – hari besar nasional dan nilai perjuangan daerah}}{\text{Jumlah pelaksanaan peringatan hari – hari besar nasional dan nilai – nilai perjuangan daerah}} \times 100\%$	SEKSI KESATUAN DAN KETAHANAN BANGSA
4.	Terciptanya masyarakat yang demokratis dan dinamis	Cakupan pembinaan politik terhadap LSM, Ormas dan OKP	%	$\frac{\text{Jumlah ormas, LSM, OKP yg mendapatkan pembinaan politik}}{\text{Jumlah ormas, LSM, OKP terdaftar}} \times 100\%$	SEKSI POLITIK DALAM NEGERI

BB. KECAMATAN

NO.	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULASI/RUMUSAN PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB (BIDANG)
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah dan pelaporan kinerja pemerintah daerah	Nilai evaluasi AKIP Kecamatan	Skor	Nilai evaluasi AKIP yang diperoleh	KECAMATAN
		Persentase partisipasi masyarakat dan lembaga masyarakat dalam musrenbang kelurahan	%	$\frac{\text{Jumlah lembaga dan tokoh masyarakat yang berpartisipasi dalam musrenbang kelurahan}}{\text{Jumlah lembaga dan tokoh masyarakat yang ada dalam kelurahan}} \times 100\%$	KECAMATAN YANG ADA KELURAHAN
2.	Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan sumber daya aparatur desa binaan	Persentase kelengkapan administrasi desa binaan	%	$\frac{\text{Jumlah desa yang lengkap administrasi}}{\text{Jumlah desa binaan}} \times 100\%$	KECAMATAN
3.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Persentase meningkatnya kualitas pelayanan publik	%	$\frac{\text{Jumlah pelayanan yang terselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah pelayanan}} \times 100\%$	KECAMATAN
		Nilai SKM	Skor	Nilai SKM	KECAMATAN

NO.	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULASI/RUMUSAN PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB (BIDANG)
1	2	3	4	5	6
		Persentase penanganan pengaduan masyarakat	%	$\frac{\text{Jumlah pengaduan masyarakat yang tertangani}}{\text{Jumlah pengaduan masyarakat yang disampaikan}} \times 100\%$	KECAMATAN
		Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang difasilitasi dengan baik dan layak	%	$\frac{\text{Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang difasilitasi dengan baik dan layak}}{\text{Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) seluruhnya}} \times 100\%$	KECAMATAN YANG MEMILIKI KELURAHAN

BUPATI PEMALANG,



JUNAEDI